

Amien Rais Sebut Jokowiomics Gagal,

Ini Respons Istana

Trio Hamdani - detikFinance

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4098560/amien-rais-sebut-jokowinomics-gagal-ini-respons-istana>

Rabu, 04 Jul 2018 19:55 WIB



Amien Rais/Foto: Indra Komara-detikcom

Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan PAN, [Amien Rais](#) kembali menyindir kebijakan ekonomi Presiden [Joko Widodo](#) (Jokowi). [Amien](#) menyebut konsep [Jokowiomics](#) gagal. Pihak Istana Presiden pun mempertanyakan maksud dari pernyataan tersebut.

Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) bidang ekonomi Ahmad Erani Yustika mengatakan, pemerintah tidak memahami istilah Jokowiomics yang dipakai Amien Rais.

"Nah itu apa yang dimaksud dengan Pak Amien Rais mengenai yang dia pahami tentang Jokowiomics kita nggak ngerti," katanya saat dihubungi **detikFinance**, Jakarta, Rabu (4/7/2018).

Baca juga: [Amien Rais: Jokowiomics Gagal](#)

"Jadi kalau yang dimaksud dengan Pak Amien Rais mengenai Jokowiomics kami sendiri juga nggak pernah tahu, karena tidak pernah presiden itu menyampaikan istilah Jokowiomics atau pemerintah misalnya kementerian ekonomi bilang Jokowiomics, lanjutnya.

Jokowiomics yang disebut Amien Rais gagal, meliputi daya beli yang makin lemah, utang makin menggunung, hingga serbuan tenaga kerja asing (TKA). Istana pun menepis kegagalan itu.

Baca juga: [Amien Rais Bertekad Kalahkan Jokowi: Enough Is Enough](#)

Erani mengatakan, pemerintahan Presiden Jokowi sudah membawa perekonomian lebih baik. Paling tidak ada 6 poin besar, yakni mewujudkan keadilan ekonomi, tata kelola pembangunan, dan kerangka makroekonomi yang kuat.

Kemudian, penguatan daya saing dan iklim investasi, landasan pertumbuhan yang berkesinambungan dalam jangka panjang, dan meningkatkan kemandirian ekonomi.

Baca juga: [Amien Bicara Nawasengsara, Gerindra Singgung Ekonomi Era Jokowi](#)

"Nah kalau platform besar pemerintah di ekonomi itu kan dibagi paling tidak dalam 6 tadi itu lah. Kurang lebih itu yang dikerjakan, dan capaian capaian itu hampir semuanya positif. Makanya kita susah menyampaikan dimana letak kegagalan tadi itu," jelasnya.

"Kita ingin sampaikan bahwa apa yang dikatakan pemerintah misalnya tidak cakap untuk mengelola ekonomi itu jauh panggang dari api. Semua data itu nggak ada yang menunjukkan kemunduran ekonomi, itu nggak ada," tutur mantan Dirjen di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu.

(hns/hns)

KEIN: Ekonomi Indonesia Mengalami Kemajuan

Raden Fadli Sumawilaga - detikFinance

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4098763/kein-ekonomi-indonesia-mengalami-kemajuan>

Rabu, 04 Jul 2018 21:30 WIB



Foto: Dok. KEIN

Jakarta - Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menilai hingga saat ini pemerintah masih terus mendorong terjadinya transformasi struktural, khususnya di bidang ekonomi. Kebijakan ini dilakukan untuk mewujudkan kemajuan bangsa, baik secara umum dan juga secara ekonomi.

Wakil Ketua KEIN, Arif Budimanta, berpandangan bahwa kebijakan tersebut dinilai cukup positif secara struktural. Hal tersebut terlihat dari berbagai indikator yang menunjukkan bahwa kondisi Indonesia semakin baik, khususnya dilihat dari pembangunan di bidang perekonomian.

"Transformasi struktural terus berlangsung. Tentunya sejalan dengan prioritas pembangunan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (4/7/2018).

Ia menyampaikan hal itu dalam halalbihalal yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta, hari ini. Dalam kesempatan tersebut, hadir antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MPR Zulkifii Hasan, serta tokoh-tokoh nasional lainnya.

Baca juga: [KEIN Yakin Ekonomi Pancasila Bisa Bikin Rupiah Stabil](#)

Arif menjelaskan beberapa kebijakan pemerintah yang mendorong kemajuan bangsa seperti adanya pemangkasan pajak untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi 0,5% dari sebelumnya 1%. Menurutnya, kebijakan tersebut akan mendorong usaha kecil bisa masuk ke sektor formal, sehingga usaha tersebut akan mampu mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memiliki bunga lebih rendah.

"Jadi jangan hanya dilihat sebagai sekadar tarif. Tapi bagaimana sektor usaha informal yang awalnya secara administrasi unbankable menjadi bankable," jelasnya.

Dia mengutip data Kementerian ATR/BPN di tahun 2017 yang menyebutkan sebanyak 5 juta sertifikat tanah telah diterbitkan.

"Pemerintah mempercepat redistribusi aset dan akses untuk meningkatkan penguasaan aset masyarakat bawah dan memberikan alat untuk berproduksi," ujarnya.

Arif menambahkan, kebijakan yang diluncurkan oleh pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo tersebut merupakan perubahan yang sangat struktural, terutama terkait dengan penguasaan aset.

"Kebijakan tersebut sangat bagus, karena dapat membuat masyarakat berdaya," tambahnya.

Dia pun menegaskan, kebijakan tersebut dapat meminimalisasi penguasaan aset yang sangat besar oleh sedikit orang atau oligarki. Oligarki, kata Arif, membuat penguasaan aset terkonsentrasi pada sekelompok orang, sehingga dapat mengakibatkan ketimpangan.

"Karena itulah, kebijakan (Reforma Agraria) tersebut merupakan koreksi secara structural penguasaan aset di Indonesia dengan membuat masyarakat jadi lebih berdaya," ungkapnya.

Baca juga: [Inflasi Juni 0,59%, KEIN Minta Waspada Perlambatan Ekonomi](#)

Program Reforma Agraria sendiri akan mendistribusikan 9 juta hektar tanah sebagai objek reforma agraria dan skema perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektar kepada rakyat.

Selain itu, transformasi struktural juga dikatakan terjadi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yang semula wajib sekolah 9 tahun menjadi 12 tahun. Kewajiban itu juga didukung oleh Program Indonesia Pintar (PIP) untuk mencegah anak usia sekolah dari ancaman putus sekolah.

"Semua itu untuk kemajuan Indonesia. Semangat itu sesuai dengan semboyan Muhammadiyah yakni Islam Berkemajuan. Program-program itu juga membawa cara pandang dan cara kerja baru memajukan Indonesia," pungkas Arif. (idr/idr)